

PENILAIAN ANCAMAN TIONGKOK DI LAUT NATUNA UTARA MENGUNAKAN ANALISIS PEST

Hikmatul Qosimah, Bambang Suhatro, Rina Marlina

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 62 TA 2024,

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

hikmahqosimah2701@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i12.172>

Abstrak

Dinamika geostrategis dan ancaman di Laut Natuna Utara merupakan hal yang krusial bagi Negara Indonesia. Permasalahan perbatasan laut wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah laut negara lain bertambah dengan klaim *Ten Dash Line* Tiongkok. Klaim wilayah tersebut secara umum melanggar UNCLOS 1982 dan bersinggungan dengan ZEE Indonesia. Penelitian dilaksanakan dengan metode mixed method dengan narasumber ahli bidang hubungan luar negeri dan kerjasama, narasumber ahli akademisi dan narasumber praktisi perbatasan wilayah di Laut Natuna Utara. Dari analisis PEST, ancaman terbesar dari Tiongkok kepada Indonesia adalah ancaman teknologi dan ekonomi. Berdasarkan hasil pengamatan ancaman maritim di lapangan, pelanggaran wilayah dan kejahatan transnasional menjadi perhatian bagi negara Indonesia.

Kata kunci: Ancaman, Laut Natuna Utara, Analisis PEST

Abstract

The geostrategic dynamics and threats in the North Natuna Sea are crucial for the State of Indonesia. The issue of maritime boundaries in Indonesia, which directly borders the maritime areas of other countries, has increased with China's claim of the Ten Dash Line. The claim to the area in question generally refers to UNCLOS 1982 and intersects with Indonesia's EEZ. The research was conducted using a mixed method approach with expert sources in the field of foreign relations and cooperation, academic experts, and practitioners from the border areas in the North Natuna Sea. From the PEST analysis, the biggest threat from China to Indonesia is the threat of technology and economy. Based on observations of maritime threats in the field, territorial violations and transnational crime have become a concern for Indonesia.

Keywords: Threats, Natuna Utara Sea, PEST Analysis.

PENDAHULUAN

Inisiatif Sabuk dan Jalan (*Belt and Road Initiative*) yang diprakarsai oleh Tiongkok pada tahun 2013 merupakan proyek ambisius yang bertujuan untuk memperkuat konektivitas infrastruktur dan hubungan ekonomi global antara Asia, Eropa, dan Afrika (Jones & Zeng, 2019). Inisiatif ini mencakup dua jalur utama, yaitu Jalur Ekonomi Sabuk Sutra (*Silk Road Economic Belt*) dan Jalur Maritim Sutra Abad ke-21 (*21st Century Maritime Silk Road*). Jalur ini dirancang untuk menghubungkan lebih dari 60 negara melalui jaringan transportasi darat seperti kereta api dan jalan raya, serta jalur laut yang mencakup pelabuhan utama. Hingga tahun 2020, lebih dari 140 negara telah menunjukkan dukungan dan bekerja sama dalam kerangka BRI, menandakan dampaknya yang luas terhadap tatanan ekonomi global.

Namun, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, BRI menghadapi kritik terkait jaringannya yang luas dan risiko geopolitik yang mungkin terjadi. Kritik terhadap BRI mencakup kekhawatiran mengenai jebakan utang yang dapat menjerat negara-negara penerima proyek serta masalah transparansi dan keberlanjutan proyek pembangunan. Banyak negara berkembang

yang menerima pinjaman besar dari Tiongkok untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur BRI berisiko menghadapi beban utang yang signifikan (Zhu, 2019). Kasus Sri Lanka menjadi contoh penting di mana negara tersebut terpaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhan Hambantota kepada perusahaan milik negara Tiongkok setelah tidak mampu membayar kembali pinjaman yang terkait dengan pembangunan pelabuhan tersebut (Wibisono, 2019). Di tengah tantangan tersebut, BRI terus dianggap sebagai alat utama dalam strategi kebijakan luar negeri Tiongkok yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh global dan menyusun ulang dinamika kekuatan ekonomi (Mearsheimer, 2019).

Garis Peta Sembilan Garis Putus (*Nine-Dash Line*) yang diklaim oleh Tiongkok merupakan garis demarkasi yang mencakup sebagian besar Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini diajukan oleh Tiongkok sebagai dasar hak historis atas wilayah laut yang luas tersebut (Hayton, 2014). Meskipun demikian, klaim ini telah menjadi sumber sengketa regional yang signifikan, mengingat wilayah tersebut juga diklaim oleh beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Konflik di Laut China Selatan tidak hanya menyangkut hak atas wilayah tetapi juga terkait dengan hak untuk eksploitasi sumber

daya alam seperti minyak dan gas serta jalur perdagangan maritim utama (Hidayat, 2024). Pada tahun 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag memutuskan bahwa klaim garis sembilan putus Tiongkok tidak memiliki dasar hukum berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*), sebuah keputusan yang ditolak oleh Tiongkok (*Permanent Court of Arbitration, 2016*).

Masalah perbatasan maritim antara Tiongkok dan Indonesia terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara lebih meruncing beberapa tahun terakhir. Indonesia mengklaim ZEE ini berdasarkan UNCLOS, yang memberikan hak eksploitasi eksklusif sepanjang 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Klaim ini sempat berseberangan dengan klaim Tiongkok yang mencakup area di sekitar Kepulauan Natuna dalam skala Garis Sembilan Putus mereka. Ketegangan meningkat ketika kapal-kapal nelayan Tiongkok, yang dikawal oleh Coast Guard mereka, beroperasi di wilayah yang diklaim oleh Indonesia sebagai ZEE-nya. Insiden-insiden ini menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua negara, walaupun Tiongkok mengakui kedaulatan teritorial Indonesia di wilayah Natuna, namun menolak untuk mengakui klaim ZEE

Indonesia. Konflik ini mencerminkan tantangan kompleks dalam penegakan hukum internasional dan penyelesaian sengketa maritim bagi Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode campuran (*mix method*). Analisis yang digunakan untuk menilai ancaman Tiongkok di Laut Natuna Utara dalam tulisan ini adalah analisis PEST (*Politics, Economics, Social, Technology*). Penelitian dilaksanakan pada Juli 2024 di Jakarta. Data primer diperoleh dari wawancara dan penilaian kriteria PEST oleh narasumber bidang hubungan luar negeri dan kerjasama, praktisi intelijen Asia Tenggara dan narasumber dari lembaga pendidikan Seskoal. Data sekunder diperoleh dari literatur Laut Natuna Utara dan sejarah konflik dan sengketa wilayah antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara.

PEMBAHASAN

Robert Jervis merupakan seorang pakar dalam teori politik dan hubungan internasional yang terkenal karena kontribusinya terhadap teori ancaman dan perilaku dalam keamanan nasional. Salah satu teori penting yang dikembangkannya adalah perbedaan antara ancaman (*threat*) dan "kecemasan" (*fear*) di dalam konteks

keamanan. Teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana persepsi terhadap ancaman dapat mempengaruhi reaksi dan keputusan terkait politik keamanan. Menurut Jervis, ancaman adalah kondisi objektif yang menunjukkan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan atau berbahaya bagi entitas tertentu, baik itu negara maupun kelompok. Sumber ancaman dapat beragam, mulai dari ancaman militer tradisional hingga ancaman non-militer seperti ancaman ekonomi atau ideologis, yang bisa bersifat nyata atau potensial tergantung situasi dan konteksnya.

Poin-poin penting terkait ancaman dalam teori yang dikemukakan oleh Robert Jervis meliputi:

1) Ancaman objektif dan subjektif: Dalam analisis ancaman, penting untuk memahami bahwa persepsi individu atau negara terhadap ancaman dapat bervariasi berdasarkan faktor psikologis dan kontekstual. Hal ini mengarahkan kita pada perbedaan antara ancaman objektif, yang mencerminkan kondisi atau situasi nyata dengan potensi bahaya, dan ancaman subjektif, yang didasarkan pada interpretasi individu. Sebagaimana dikemukakan oleh Jervis, ancaman yang dirasakan (subjektif) tidak selalu sejalan dengan ancaman nyata (objektif), menunjukkan perlunya

pemahaman mendalam terhadap kedua jenis ancaman ini dalam konteks politik dan keamanan.

2) Kecemasan sebagai faktor penggerak tindakan: Kecemasan dapat menjadi faktor penggerak dalam tindakan politik dan keamanan akibat pengaruhnya terhadap persepsi ancaman. Respons emosional atau mental terhadap ancaman yang dirasakan, baik internal maupun eksternal, memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan negara. Dengan demikian, memeriksa bagaimana kecemasan memengaruhi pengambilan keputusan politik menjadi esensial dalam memahami dinamika politik dan keamanan yang lebih luas.

3) Dampak terhadap pengambilan keputusan: Jervis mengemukakan bahwa kecemasan subjektif terhadap ancaman memegang peran krusial dalam dinamika politik dan keamanan. Persepsi ancaman ini dapat memicu berbagai bentuk respons, termasuk peningkatan pertahanan atau tindakan agresif. Oleh karena itu, Teori Ancaman dan Kecemasan Jervis menekankan pentingnya pemahaman mendalam mengenai bagaimana kecemasan dapat memengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat negara.

Ancaman perbatasan laut merupakan topik yang sangat fundamental bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah perairan dan akses perbatasannya terbuka dari berbagai arah. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas yang tidak hanya menjadi jalur lalu lintas strategis, tetapi juga kaya akan sumber daya alami. Kondisi geografis ini menjadikan pengawasan perbatasan laut suatu tantangan besar, karena banyak sekali titik masuk yang rentan terhadap pelanggaran. Keamanan maritim tidak hanya melibatkan pertahanan fisik terhadap infiltrasi atau serangan militer, tetapi juga mencakup beragam isu lainnya seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia, dan ancaman lingkungan.

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya menjaga integritas wilayahnya, dengan memerlukan koordinasi yang ketat dan penggunaan teknologi mutakhir untuk memantau dan mengamankan perbatasan laut. Lebih lanjut, kerjasama internasional dan regional juga menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan kedaulatan maritim serta memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan klaim teritorial. Implementasi kebijakan yang tegas, pengembangan kapasitas angkatan laut dan penjaga pantai, serta kerjasama lintas sektor menjadi pilar

strategis dalam memperkuat keamanan perbatasan laut Indonesia, menghadirkan tantangan yang menuntut komitmen serta adaptasi terus-menerus dalam respon terhadap dinamika ancaman yang terus berubah.

Keren Yarhi-Milo dalam artikel jurnalnya "*In the Eye of the Beholder: How Leaders and Intelligence Communities Assess the Intentions of Adversaries*" mengkategorikan niat politik negara menjadi tiga: ekspansionis, oportunistik, dan status quo (Keren, 2013).

1) Negara ekspansionis adalah negara yang aktif berusaha memperluas wilayah atau pengaruh politik, ekonomi, atau militernya baik secara regional maupun global melalui berbagai cara seperti invasi militer, aneksasi, atau intervensi dalam urusan internal negara lain. Mereka cenderung melihat konflik dan ketegangan sebagai sarana untuk mengamankan sumber daya dan meningkatkan posisi strategisnya, yang sering kali menyebabkan benturan dengan negara status quo atau yang lain yang melihat tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas global.

2) Negara oportunistik, sebaliknya, cenderung memanfaatkan situasi atau peluang yang menguntungkan tanpa komitmen jangka panjang, menjadikan

mereka mitra yang tidak selalu dapat diandalkan dalam hubungan internasional. Mereka responsif terhadap perubahan dan dapat bertindak agresif dalam jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan strategis, tetapi juga bisa tidak berpikir jauh ke depan terkait konsekuensi dari tindakan mereka.

3) Negara status quo cenderung menjaga stabilitas internasional dan menghindari konflik. Mereka mendukung diplomasi dan kerjasama internasional serta mematuhi norma-norma dan hukum internasional untuk mempertahankan kedamaian dan tatanan global yang ada, seringkali menekankan keseimbangan kekuatan dan strategi yang bersifat defensif.

Perkembangan geostrategis di Laut China Selatan mencerminkan dinamika yang signifikan dalam tatanan regional, terutama dengan adanya klaim teritorial yang dilakukan oleh Tiongkok. Klaim teritorial ini, yang ditandai dengan pembangunan instalasi militer dan pulau buatan, menunjukkan langkah awal tindakan agresif dalam interaksi Tiongkok dengan negara-negara di kawasan tersebut. Tindakan Tiongkok ini memunculkan kekhawatiran atas stabilitas regional dan mengundang reaksi keras dari beberapa negara tetangga serta kekuatan

global. Selain itu, Laut China Selatan adalah jalur perairan yang sangat penting bagi perdagangan internasional, di mana sekitar sepertiga perdagangan maritim dunia melewati kawasan ini, sehingga kepentingan ekonomi juga sangat dipertaruhkan.

Sengketa ini tidak hanya menyangkut klaim teritorial semata, tetapi juga menimbulkan masalah yang lebih luas terkait hak-hak eksploitasi sumber daya alam, khususnya perikanan dan potensi minyak dan gas bumi. Peningkatan aktivitas militerisasi oleh Tiongkok di kawasan tersebut menambah dimensi militer dalam sengketa yang telah kompleks ini, memerlukan respon diplomatik yang hati-hati dan strategis dari ASEAN, serta perhatian dari masyarakat internasional untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Penegakan hukum internasional, terutama melalui mekanisme yang disediakan UNCLOS, menjadi ujian kritis dalam resolusi perselisihan ini, mencerminkan ketegangan antara klaim teritorial nasional dengan prinsip kebebasan navigasi di perairan internasional.

Analisis PEST merupakan metode yang esensial dalam mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan suatu organisasi atau negara. Akronim PEST

mencakup dimensi *Political* (Politik), *Economics* (Ekonomi), *Social* (Sosial), dan *Technological* (Teknologi). Analisis ini bertujuan untuk memahami konteks eksternal yang melingkupi operasi sebuah entitas, memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi strategi, keputusan, dan kinerja. Faktor politik melibatkan stabilitas politik, perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah, dan hubungan internasional. Faktor ekonomi mencakup kondisi makroekonomi, inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Faktor sosial mencakup unsur-unsur seperti nilai dan norma budaya, demografi, sikap masyarakat, dan tren sosial yang mempengaruhi penerimaan produk atau kebijakan. Faktor teknologi meliputi perubahan, inovasi, dan kemajuan teknologi, serta perlindungan kekayaan intelektual.

Melalui analisis PEST, organisasi atau negara mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai lingkungan eksternal tempat mereka beroperasi, sehingga mereka dapat mengenali peluang dan ancaman yang ada. Dalam konteks ini, analisis PEST menjadi alat yang berharga untuk merumuskan strategi adaptif yang memungkinkan organisasi maupun negara untuk bertahan dan berkembang dalam dinamika lingkungan yang kompleks.

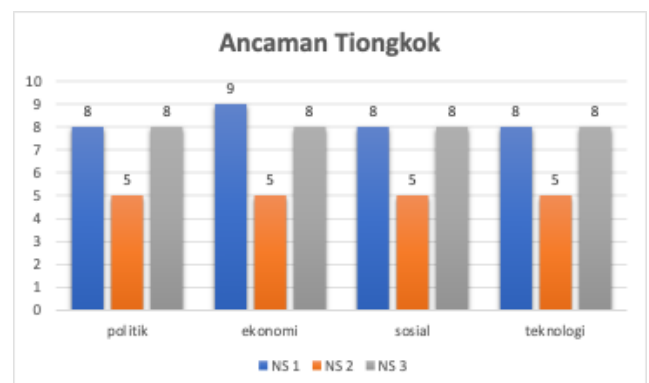
Dengan memahami keempat dimensi tersebut, entitas dapat mengevaluasi risiko dan potensi yang muncul, memastikan kesiapan dalam menghadapi perubahan, dan merancang keputusan yang lebih terinformasi dan strategis.

Tabel konversi nilai ancaman PEST

Kategori Ancaman	Nilai Ancaman
Ancaman superior	9
Ancaman sangat besar	8
Ancaman besar	7
Ancaman cenderung besar	6
Ancaman normal	5
Ancaman cenderung kecil	4
Ancaman kecil	3
Ancaman sangat kecil	2
Ancaman inferior	1

Penilaian ancaman menggunakan skala likert rentang 1-9 untuk memberikan spektrum yang cukup luas bagi narasumber dalam menilai tingkat ancaman secara objektif.

Grafik Hasil Penilaian Narasumber



Secara umum tiga narasumber memberikan penilaian ancaman Tiongkok yang tinggi untuk aspek politik, ekonomi,

sosial dan teknologi di kawasan Laut Natuna Utara. Namun narasumber bidang hubungan luar negeri dan kerjasama memberikan penilaian nilai normal karena melihat kebijakan politik dan luar negeri Tiongkok yang tidak mengancam Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan dari total nilai ancaman secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel Total nilai Jenis Ancaman

Teknologi	Total	Peringkat
Politik	23.21	4
Ekonomi	24.24	2
Sosial	23.22	3
Teknologi	24.49	1

Grafik Skor Ancaman PEST



Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa ancaman teknologi dan ekonomi merupakan ancaman yang dominan diberikan oleh Tiongkok kepada Indonesia terkait dengan permasalahan Laut Natuna Utara. Penggunaan teknologi canggih oleh Tiongkok, terutama dalam segmen pengawasan dan eksplorasi sumber daya

alam, semakin memperkuat eksistensinya di wilayah Laut Natuna Utara. Melalui pemanfaatan teknologi mutakhir seperti sistem pengawasan maritim berbasis satelit, kapal survei otomatis, dan sensor bawah air, Tiongkok mampu memantau aktivitas di wilayah tersebut secara real-time dan efisien. Peningkatan kapabilitas teknologi ini tidak hanya memperkuat klaim maritim Tiongkok tetapi juga memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan lebih efektif, menempatkan Tiongkok pada posisi yang lebih dominan dalam perebutan sumber daya strategis di kawasan tersebut. Pendekatan ini tak hanya memiliki implikasi ekonomi tetapi juga berpotensi mempengaruhi dinamika geopolitik dan kestabilan regional di Laut Natuna Utara.

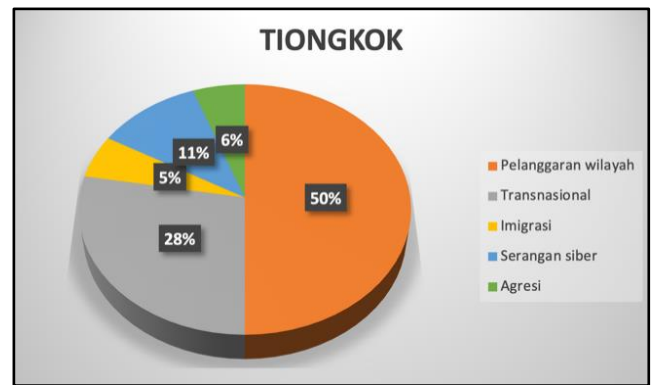
Pada aspek ekonomi, Tiongkok melalui investasi dan ekspansi perdagangan yang direalisasikan dalam inisiatif BRI, secara signifikan menciptakan ketergantungan bagi negara-negara yang terlibat dalam kerjasama keuangan tersebut. Proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang didanai oleh China di berbagai negara peserta BRI melalui paket pendanaan yang mencakup pinjaman lunak dan hibah. Namun, dengan adanya ketergantungan finansial dan teknis yang berkembang, negara-negara penerima

bantuan sering berada dalam posisi negosiasi yang kurang menguntungkan, sehingga terpaksa memberikan konsesi yang menguntungkan Tiongkok. Untuk Indonesia, kondisi ini memperumit situasi ekonomi dan politik, terutama ketika diharuskan menjaga keseimbangan antara penarikan manfaat dari investasi Tiongkok dan menjaga kepentingan nasional serta kemandirian ekonomi. Integrasi Indonesia dalam hub perdagangan yang didorong oleh BRI berisiko menciptakan ketergantungan yang lebih dalam pada pasar Tiongkok, yang pada akhirnya bisa membatasi fleksibilitas Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia.

Pendalaman wawancara yang dilakukan kepada tiga narasumber terhadap jenis ancaman maritim Tiongkok kepada Indonesia menghasilkan data sebagai berikut:

Tabulasi Jenis Ancaman Tiongkok

Tiongkok	Peringkat Ancaman			Skor
	1	2	3	
Pelanggaran wilayah	3	0	0	9
Transnasional	0	2	1	5
Imigrasi	0	0	1	1
Serangan siber	0	1	0	2
Agresi	0	0	1	1



Berdasarkan data faktual, pelanggaran wilayah merupakan ancaman yang paling sering terjadi di Laut Natuna Utara, dengan frekuensi mencapai 50% dari seluruh insiden yang tercatat. Pelanggaran ini, yang kerap kali mencakup penetrasi oleh kapal-kapal asing tanpa izin, memanifestasikan dinamika geopolitik yang kompleks antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Fenomena ini terjadi dalam konteks dimana ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sering menjadi tujuan operasi ilegal oleh kapal penangkap ikan, misalnya dari China dan Vietnam.

Kejadian pelanggaran tersebut bukan hanya menghadirkan ancaman langsung terhadap kedaulatan maritim Indonesia, namun juga memperparah tekanan terhadap sumber daya laut yang kritis bagi kehidupan masyarakat pesisir setempat. Salah satu ilustrasi konkret adalah insiden yang terjadi pada Januari 2020, di mana kapal-kapal berbendera China terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Peristiwa ini memicu respons keras

dari kedaulatan maritim Indonesia yang mengirimkan kapal patroli guna mengusir pelanggar tersebut.

Kendati upaya penegakan hukum maritim sudah dilaksanakan melalui patroli intensif, kendala yang dihadapi oleh Indonesia antara lain terbatasnya jumlah dan kapabilitas kapal patroli serta keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani wilayah maritim yang luasnya sangat signifikan. Kondisi ini berimplikasi negatif terhadap kesejahteraan ekonomi lokal karena hasil tangkapan ikan ilegal mengurangi kesempatan nelayan Indonesia, dan berpotensi mengancam tahap kelestarian ekosistem laut yang penting untuk keberlangsungan spesies-spesies endemik.

Dalam menangani fenomena pelanggaran wilayah yang kerap terjadi di Laut Natuna Utara, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk merumuskan dan menerapkan solusi yang lebih strategis. Solusi ini harus melibatkan peningkatan teknologi pengawasan yang secara signifikan dapat memperkuat keamanan laut. Implementasi teknologi tinggi seperti penggunaan drone dan satelit menjadi prioritas krusial untuk memantau aktivitas maritim di kawasan perbatasan yang luas dan sulit dijangkau. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas

kapal asing yang mencurigakan, serta memberikan data real-time yang dapat digunakan oleh aparat keamanan maritim untuk mengambil tindakan cepat dan tepat.

Selanjutnya, integrasi sistem pengawasan ini harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengamanan laut. Melalui pelatihan yang intensif dan berbasis teknologi, personel keamanan maritim dapat mengoperasikan alat-alat canggih tersebut secara efektif. Keterbatasan anggaran dan sumber daya juga harus diatasi melalui pengembangan kerjasama multilateral dengan negara-negara tetangga dan organisasi regional seperti ASEAN. Kerjasama ini memungkinkan adanya dukungan teknis, pertukaran informasi intelijen, serta koordinasi operasi patroli terpadu yang lebih efisien dan efektif.

Sebagai bagian dari solusi strategis, kebijakan-kebijakan maritim nasional perlu diselaraskan dengan kepentingan internasional, terutama terkait dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sering menjadi sumber konflik. Forum-forum diplomatik dan perjanjian bilateral yang mempertegas batas-batas maritim dan hak-hak eksplorasi perlu diperkuat agar terdapat pemahaman dan penghormatan yang lebih baik dari negara-negara lain. Dengan demikian, peningkatan

teknologi pengawasan dan penyelarasan kebijakan internasional memainkan peran kunci dalam meningkatkan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, serta melindungi sumber daya laut yang vital bagi kesejahteraan ekonomi dan ekologi bangsa.

Ancaman transnasional menempati posisi kedua dengan proporsi sebesar 28%, mencerminkan dampak signifikan dari aktivitas lintas batas yang memengaruhi keamanan di kawasan Laut Natuna Utara. Dalam kajian akademis, term "ancaman transnasional" merujuk pada tindakan ilegal yang meliputi penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perburuan ilegal sumber daya laut, serta aktivitas-aktivitas terorisme dan pembajakan yang melibatkan lebih dari satu negara. Aktivitas-aktivitas kriminal ini tidak hanya menantang kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap stabilitas regional.

Sebagai contoh spesifik, kasus penyelundupan narkoba yang memanfaatkan jalur laut di perairan Natuna Utara menunjukkan modus operandi yang canggih, di mana para pelaku menggunakan kapal-kapal nelayan untuk menyamarkan kegiatan ilegal mereka. Kehadiran aktivitas semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal yang menggantungkan

mata pencahariannya pada sumber daya laut, tetapi juga mengganggu keamanan dan keteraturan di wilayah tersebut. Ketergantungan pada pengawasan konvensional yang terbatas mengakibatkan kebocoran dan kelalaian dalam mendeteksi kegiatan ilegal, yang sering kali baru terungkap setelah ancaman telah meluas.

Pentingnya teknologi pengawasan mutakhir seperti drone dan satelit, seperti yang telah disinggung sebelumnya, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Dengan menggunakan teknologi tinggi, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih efektif, memungkinkan deteksi dan pencegahan lebih dini terhadap ancaman transnasional tersebut. Kemampuan untuk melacak pergerakan kapal secara real-time memungkinkan petugas keamanan untuk melakukan intervensi tepat waktu, sekaligus menyajikan bukti kuat untuk penegakan hukum.

Di sisi lain, kerjasama internasional dan peningkatan diplomasi maritim juga menjadi komponen esensial dalam menghadapi ancaman transnasional. Dalam hal ini, perjanjian bilateral yang mencakup tindakan bersama dalam patroli, pertukaran informasi intelijen, dan pelatihan yang berkaitan dengan pengamanan perbatasan laut dapat

memperkuat kemampuan regional dalam menghadapi tantangan keamanan di Laut Natuna Utara. Dengan demikian, perpaduan teknologi pengawasan yang unggul dan peningkatan kerjasama global menjanjikan solusi yang lebih terintegrasi dan komprehensif, serta mampu menjawab kompleksitas ancaman transnasional dengan efektif.

Serangan siber juga menjadi ancaman penting, meskipun dengan proporsi yang lebih rendah, yaitu 11% dari total kejadian. Hal ini menegaskan bahwa selain ancaman fisik, keamanan di kawasan Laut Natuna Utara juga terancam oleh aktivitas di dunia maya yang memerlukan tindakan mitigasi komprehensif. Dalam konteks akademis, ancaman siber dapat dikategorikan sebagai segala bentuk serangan yang terjadi di domain digital yang bertujuan untuk merusak, mencuri data, mengganggu layanan, atau memanipulasi informasi. Seiring dengan semakin terintegrasinya teknologi informasi dalam operasi maritim, baik untuk navigasi, pengelolaan lalu lintas laut, maupun komunikasi, maka kerentanannya terhadap serangan siber juga meningkat.

Sebagai ilustrasi, pertimbangkan sebuah kasus di mana sistem *Navigational Telex* (NAVTEX) yang digunakan oleh kapal-kapal untuk menerima informasi navigasi dan

peringatan cuaca, mengalami serangan siber yang mengakibatkan penyebaran informasi palsu. Akibatnya, kapal-kapal yang beroperasi di kawasan Laut Natuna Utara bisa salah dalam menentukan jalur navigasi, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan laut, konfrontasi antar kapal, atau bahkan mengarah kepada disrupsi yang lebih luas di jalur perdagangan utama.

Selain itu, serangan siber juga dapat menargetkan infrastruktur maritim kritical seperti pelabuhan dan fasilitas pendukung di sekitarnya. Misalnya, serangan ransomware bisa mengakibatkan pelabuhan utama di kawasan tersebut lumpuh, menghambat arus barang dan perdagangan yang penting. Kegagalan dalam menangani insiden semacam ini tidak hanya akan mempengaruhi ekonomi regional, tetapi juga berimplikasi pada logistik dan supply chain global, yang pada akhirnya dapat menaikkan biaya dan memperlambat laju perdagangan internasional.

Strategi mitigasi terhadap ancaman siber di kawasan ini perlu mencakup beberapa aspek penting. Pertama, diperlukan penerapan protokol keamanan jaringan yang lebih ketat untuk melindungi sistem-sistem kritical dari akses yang tidak sah. Implementasi enkripsi data dan penggunaan *firewall* yang canggih merupakan langkah-

langkah dasar yang harus diambil. Kedua, peningkatan kapabilitas deteksi dan respons terhadap insiden keamanan siber sangat penting. Ini bisa ditempuh melalui adopsi teknologi kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi anomali dalam lalu lintas data serta pelatihan berkelanjutan bagi staf dalam aspek keamanan siber.

Selain aspek teknis, aspek kelembagaan dan kerjasama antar negara juga tak kurang pentingnya. Pertukaran intelijen siber dan kolaborasi regional dalam hal pengawasan dan respons cepat menjadi krusial untuk mengantisipasi serta menangani serangan siber lintas batas dengan efisien. Dengan demikian, pendekatan yang multifaset dan terintegrasi menjadi keharusan dalam menjaga keamanan maritim di era digital ini, memastikan bahwa Laut Natuna Utara tetap aman dari ancaman baik fisik maupun siber.

KESIMPULAN

Ancaman bagi kedaulatan Negara Indonesia di Laut Natuna Utara menjadi nyata seiring dengan klaim wilayah yang diajukan oleh Tiongkok, yang memicu ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Studi dan analisis terhadap faktor-faktor eksternal terhadap empat aspek model PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi), aspek teknologi dan ekonomi

diidentifikasi sebagai faktor yang paling dominan dan memiliki potensi signifikan dalam mempengaruhi situasi di Laut Natuna Utara. Aspek teknologi merujuk pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi militer serta teknologi pemantauan yang dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan laut Indonesia. Sementara itu, aspek ekonomi mencakup pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam yang melimpah di kawasan Laut Natuna Utara, serta dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

Pelanggaran wilayah dan ancaman transnasional telah menjadi isu dominan dalam konteks keamanan global, dengan kombinasi kejadian mencapai 78%, yang menunjukkan tingkat urgensi dan frekuensi yang mengkhawatirkan. Ancaman-ancaman ini mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang merongrong stabilitas dan kedaulatan negara, seperti kegiatan penyelundupan dan perompakan. Selain itu, serangan siber telah muncul sebagai ancaman signifikan, didorong oleh meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur digital yang rentan terhadap peretasan dan pencurian data. Faktor imigrasi, baik legal maupun ilegal, juga menjadi perhatian penting, mengingat dampaknya pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Hidayat. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 579-591.
- Jones, J., & Zeng, J. (2019). Understanding China's 'Belt and Road Initiative': Beyond 'Grand Strategy' to a State Transformation Analysis. *Third World Quarterly*, 1417-1439.
- Keren, Y.-M. (2013). In the Eye of the Beholder: How Leaders and Intelligence Communities Assess the Intentions of Adversaries. *International Security Journal*.
- Mearsheimer, J. (2019). The Bound to Fail Containment of China Through the Belt and Road Forum. *Security Studies*, 1-11.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China)*. The Hague: Permanent Court of Arbitration.
- Wibisono, A. N. (2019). "China's "Belt and Road Initiative" in Sri Lanka: Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Zhu, X. (2019). Debunking Myths about China's 'Belt and Road Initiative' (BRI): The Role of Corporate Dilemmas and Dynamic Decentralization. *Journal of Contemporary China*, 914-933.